

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Sejalan dengan tema pembangunan daerah yaitu "Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam tahun 2008 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Disamping hal tersebut diatas, kebijakan alokasi anggaran akan diarahkan untuk tetap menjaga kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu maka salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai sasaran pembangunan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang

kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan.

Dalam penyusunan APBD, tinjauan atas kondisi ekonomi sangat penting guna menggambarkan ekspektasi kemajuan ekonomi suatu daerah. Sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi makro, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah asumsi-asumsi perkembangan ekonomi makro yang dituangkan didalam Pengantar Nota Rancangan APBN Tahun 2008 dengan beberapa indikator – indikator sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,8 %. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi karena mengalami perbaikan baik dari sisi permintaan agregat, maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan bersumber dari membaiknya konsumsi masyarakat, meningkatnya kegiatan investasi dari sektor swasta dan belanja modal pemerintah, serta meningkatnya ekspor karena membaiknya stabilitas perekonomian. Sebaliknya dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil dan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur.
2. Laju inflasi sebesar 6,0 %. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Disamping kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya serta kestabilan nilai tukar rupiah, kegiatan perekonomian yang semakin

meningkat diperkirakan masih dapat diimbangi dari sisi produksi seiring dengan membaiknya investasi. Akibatnya, tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran tidak memberikan tekanan terhadap harga barang-barang secara keseluruhan. Sementara itu, produksi pangan yang meningkat diiringi oleh manajemen pasokan yang efektif diperkirakan mendorong penurunan inflasi kelompok *volatile foods*.

3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan sebesar *9 ribu 100 rupiah per dollar*. Dari sisi fundamental, Neraca Pembayaran Indonesia akan tetap mencatat surplus yang berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang meningkat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.
4. Sejalan dengan menurunnya inflasi dan nilai tukar yang stabil, maka ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga ke tingkat yang lebih rendah secara bertahap dan hati-hati. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 7,5 %.

Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2006, telah menunjukkan kondisi perekonomian Lamongan yang semakin baik. Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan atas dasar harga konstan diproyeksikan sebesar Rp.4.092.914.880.000,00 di tahun 2006 meningkat dari Rp. 3.883.701.780.000,00 di Tahun 2005, dengan demikian diperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni 5,08%. Sedangkan laju inflasi Lamongan sesuai data di tahun 2006 sebesar 7,59 %.

Dengan tingkat laju yang sama, maka di Tahun 2008 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sebesar 6,8 %.

Menyikapi terhadap besaran asumsi dan perkembangan ekonomi saat ini, penyusunan APBD Tahun 2008 harus memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebijakan pembangunan yang akan dicapai. Untuk memenuhi kapasitas fiskal yang diharapkan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, upaya-upaya peningkatan fiskal daerah terus lebih didorong secara maksimal baik upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pembiayaan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan komponen-komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Defisit yang terjadi serta Kebijakan Pembiayaan ;
2. Menjabarkan terhadap perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan yang terkandung dalam rencana strategi Kabupaten Lamongan ;
3. Sebagai kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Didalam penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 3/E) ;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

- Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 2/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 5/E) ;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 7/E) ;

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Penyusunan Nota Keuangan merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis kebijakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang kondisi yang terjadi saat penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 dan melihat asumsi dasar perkiraan perkembangan ekonomi di Tahun anggaran berjalan sehingga dapat tersusunnya Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008.
2. Bab II menjelaskan mengenai kondisi perkembangan pendapatan selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini

diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan daerah dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada Bab ini juga diuraikan kebijakan pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2008, sebab – sebab kenaikan dan penjelasan secara kuantitatif dari target yang diproyeksikan.

3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan belanja selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan umum belanja daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada bab ini juga diuraikan kebijakan belanja daerah pada Rancangan APBD Tahun 2008, serta latar belakang pengalokasian belanja daerah.
4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai implikasi dari target Pendapatan yang ditetapkan dan alokasi kebutuhan belanja daerah.
5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan uraian

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

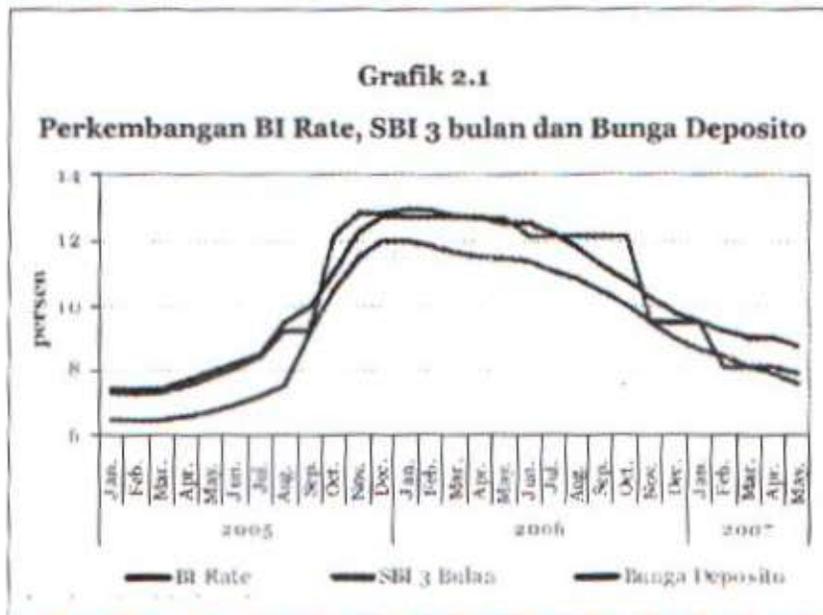
2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD mengingat peranannya dalam meningkatkan kapasitas fiskal, menekan defisit, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sumber-sumber penerimaan tersebut melalui prinsip desentralisasi fiskal, maka semua pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dalam rangka membiayai rumah tangga pemerintahan daerah.

Untuk menentukan besaran pendapatan daerah dalam APBD dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan dalam tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek pengenaan serta perbaikan, efisiensi, dan efektivitas administrasi pemungutan, serta struktur perekonomian dari suatu daerah.

Dibidang ekonomi makro Tahun 2008 diperkirakan suku bunga SBI mengalami fluktuasi namun tidak lebih dari tingkat 10 %. Perkembangan memperlihatkan bahwa suku bunga di Tahun 2007 menunjukkan tren penurunan suku bunga karena seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya inflasi. Hal ini tidak terlepas dari langkah -

langkah yang ditempuh Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga *BI Rate* secara bertahap, terukur dan berhati-hati sejak Mei 2006. Langkah penurunan suku bunga yang ditempuh Bank Indonesia ini sekaligus menandai adanya perubahan posisi kebijakan moneter dari kebijakan sebelumnya yang cenderung ketat (*tight bias*) menjadi sedikit longgar (*cautious easing*). Pada akhir tahun 2006 *BI rate* mencapai 9,75 persen atau mengalami penurunan sebesar 300 *basis points* dari 12,75 di awal tahun. Penurunan *BI rate* ini diikuti oleh menurunnya suku bunga SBI 3 bulan, yaitu dari 12,92 persen pada awal tahun 2006 menjadi 9,50 persen pada akhir tahun, atau terjadi penurunan 342 *basis points* (bps). Dengan perkembangan tersebut, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2006 mencapai 11,74 persen. Menginjak Tahun 2007 rate suku bunga rata-rata sudah dibawah 10 %.



Melihat perkembangan tersebut, maka diperkirakan di tahun 2008, tingkat rate suku bunga baik SBI 3 bulan dan bunga Deposito memiliki kecenderungan tingkat yang sama dengan laju konstan pada rata-rata 8 %.

Untuk sektor riil, penurunan ini lebih menyebabkan pengaruh yang sangat positif. Dengan penurunan suku bunga, ekspektasi Pemerintah dapat meningkatkan investasi diberbagai sektor pembangunan sehingga sektor riil akan mampu menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu diharapkan sektor perbankan meningkatkan fungsi mediasinya secara maksimal kepada dunia usaha dan masyarakat pada umumnya sehingga sektor riil dapat lebih meningkat.

Namun penurunan ini juga dapat berdampak negatif khususnya hasil yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan kas yang ditanamkan disejumlah perbankan pemerintah. Penurunan ini

menyebabkan penerimaan jasa giro dan deposito mengalami tekanan.

Besarnya pendapatan daerah tahun 2008 juga mempertimbangkan tingkat kinerja dari realisasi Pendapatan Tahun sebelumnya, dan Realisasi Semester I serta prognosisnya.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Lamongan secara dinamis mengalami kenaikan, dari pertumbuhan stagnan akibat imbas keterpurukan ekonomi nasional di era awal tahun 2000 dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 3 %, di Tahun 2006 telah mencapai 5,8 %. Beberapa program pembangunan mengalami perkembangan yang baik khususnya dibidang jasa yakni pariwisata dan properti. Pertumbuhan demikian mengakibatkan kinerja Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dalam tahun 2005-2007 dapat dicermati pada tabel II.1.

Realisasi Pendapatan Daerah dalam Tahun 2005 dari Rp. 443.956.394.219,37 mengalami kenaikan di Tahun 2006 sehingga menjadi sebesar Rp. 661.759.337.197,70 atau presentase kenaikan sebesar 49,06 %. Kinerja pendapatan daerah yang tinggi tersebut dipicu adanya alokasi dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

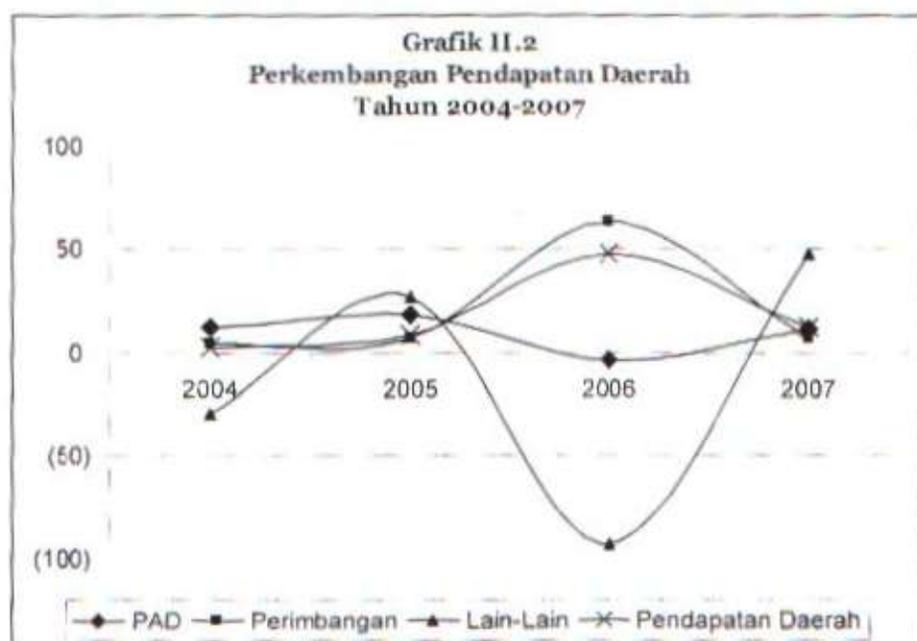
Tabel II.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2005-2007

Uraian	2005	2006	2007*
PAD	41.353.905.714,37	43.058.501.192,83	51.362.945.115,00
Dana Perimbangan	377.119.598.505,00	609.802.181.824,87	652.269.317.915,00
Lain-Lain Pendptn yg sah	25.482.890.000,00	8.898.654.180,00	35.618.684.895,00
Pendapatan Daerah	443.956.394.219,37	661.759.337.197,70	739.250.947.925,00

*) Perubahan APBD

Sumber Data : BKBD Lamongan

Sedangkan untuk Tahun 2007 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 739.250.947.925,00 sehingga apabila dibandingkan dengan besaran realisasi Pendapatan Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 11,71 %. Untuk melihat perkembangan Pendapatan Daerah dapat dilihat Grafik II.2 di bawah ini :



Sumber Data : BKBD

Dari proyeksi Pendapatan Daerah yang ditargetkan tersebut, selama Semester I telah terealisasi sebesar 52,65%. Realisasi selama Semester I dapat dicermati pada Tabel II.2

Tabel II.2
Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun 2007

Uraian	Target*)	Realisasi	%
PAD	43.111.191.800	25.690.998.974,19	59,18 %
Dana Perimbangan	640.916.756.570	338.400.105.616,00	52,80 %
Lain-Lain Pendptn yg sah	30.352.636.200	12.222.673.715,00	44,69 %
Pendapatan Daerah	714.680.484.370	376.313.778.305,19	52,65 %

*) Target APBD Tahun 2007

Sumber Data : Laporan Realisasi Semester I - BKBD

2.2 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, *trend* kenaikan peranan PAD dan *trend* penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2010 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap

diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 85 persen untuk Dana Perimbangan dan sekitar 10 persen untuk PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan sekitar 5 persen.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah :

1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan bagi Hasil kekayaan yang dipisahkan seperti BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi.
2. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana pembangunan yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap

memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan.

2.3 Estimasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi objektif dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka target Pendapatan Daerah pada tahun Anggaran 2008 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 816.150.436.221,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 10,40 %. Adapun gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel II-3
Target Pendapatan Daerah
(Tahun 2007 dan 2008)

Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008
PAD	51.362.945.115,00	53.427.683.326,00
Dana Perimbangan	652.269.317.915,00	730.104.068.000,00
Lain-Lain Penerimaan yg sah	35.618.684.895,00	32.618.684.895,00
Jumlah	739.250.947.925,00	816.150.436.221,00

Dengan melihat perkembangan Pendapatan Kabupaten Lamongan yang mengalami kenaikan tersebut, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan daerah, dari komponen penerimaan Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar 11,93 %, sedangkan untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,02 %, dan lain-Lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar - 8,42 %.

Selanjutnya masing-masing komponen tersebut diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Dari komponen Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 53.427.683.326,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.064.738.211,00 atau sebesar 4,02 % bila dibandingkan pada Tahun 2007.

Untuk melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Target Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2007- 2008

Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008
Pajak Daerah	12.114.764.000,00	13.026.275.000,00
Retribusi Daerah	18.408.250.670,00	20.914.180.200,00
Hasil Perumahan milik daerah	9.547.745.445,00	10.560.635.626,00
Lain-Lain PAD yang sah	11.292.185.000,00	8.926.592.500,00
Jumlah PAD	51.362.945.115,00	53.427.683.326,00

Dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 13.026.275.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,52 %. Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Pajak Hotel dari sisi subyek penerimaannya mengalami perkembangan yang meningkat selama 3 tahun terakhir ini. Perkembangan sektor jasa yang mulai berkembang khususnya adanya Wisata Bahari Lamongan dan Wisata Keagamaan di Sunan drajat memberikan andil yang cukup signifikan. Untuk Tahun 2008, Pajak Hotel ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 102.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 84.950.000,00 atau naik sebesar 498,24 % apabila dibandingkan dengan Tahun 2007. Guna lebih mengintensifikasikan penerimaan ini masih perlu dilakukan pembenahan manajemen penagihan, seperti penertiban pembukuan dan pencatatan subyek penerimaan pajak ini.

Pajak Restoran diproyeksikan sebesar Rp. 75.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.148.400,00 atau sebesar 23,25 %. Sebagaimana perkembangan sektor jasa yang meningkat, perkembangan sektor kuliner di Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar apabila ditinjau dari letak geografisnya dan karakter masyarakatnya yang banyak memperoleh mata pencaharian di bisnis makanan. Hal ini juga didukung berbagai langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan sektor ini sehingga mampu meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan Pajak Restoran, seperti kebijakan kelonggaran masyarakat untuk masuk disektor informal, sehingga disamping meningkatkan kesemarakan kota, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran serta mampu memberikan peningkatkan dari kontribusi sektor ini.

Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp. 290.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 179.001.000,00 atau sebesar 161,26 %. Pajak Hiburan berkembang seiring dengan kemampuan dalam mengadakan event-event di wilayah Kabupaten Lamongan. oleh karena itu penerimaan ini ada yang bersifat permanen seperti subyek pada Rumah bilyar maupun agenda olahraga daerah yang bersifat tetap, obyek pajak ini yang paling potensial dalam meningkatkan penerimaan ini adalah dari Permainan Ketangkasan yang semakin marak ada di masyarakat. Sedangkan untuk event-event yang bersifat insidentil merupakan potesi yang harus lebih dimaksimalkan karena dari event ini memiliki kontribusi obyek penerimaan yang besar.

Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp. 335.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.000.000,00 atau 12,79 %. Pengenaan pajak ini didasarkan pada nilai sewa reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi penempatan, jenis, jangka waktu, dan ukuran reklame Target kenaikan Pajak Reklame di Tahun 2008 akan diupayakan dalam memudahkan prosedur pengurusan izin reklame di wilayah Kabupaten Lamongan. Namun demikian juga akan lebih dipertimbangkan nilai estetika kota guna mendukung keindahan dan kenyamanan kota Lamongan.

Pajak Penerangan Jalan diproyeksikan sebesar Rp. 11.944.275.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 577.313.000,00 atau sebesar 5,08 %. Penerimaan Pajak ini merupakan kontributor terbesar dibandingkan dengan jenis lainnya. Kenaikan penerimaan ini disesuaikan pemakaian daya konsumsi Listrik oleh

masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Lamongan yang diperkirakan mengalami kenaikan.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diproyeksikan sebesar Rp. 200.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.234.000,00 atau sebesar 4,84 %. Potensi dari Pajak ini merupakan sumber daya alam yang sangat besar dimiliki oleh Kabupaten Lamongan. Dalam mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki tersebut perlu adanya penataan yang lebih komprehensif disamping dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga berkontribusi terhadap penerimaan melalui penataan dan pengawasan yang lebih intensif.

Pajak Parkir diproyeksikan sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.000.000,00 atau naik sebesar 38,89 %. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Guna tercapainya target dari Pajak Parkir akan dilakukan pendataan usaha parkir dan sosialisasi yang semakin intensif.

Pajak Sarang Burung diproyeksikan sebesar Rp. 55.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.864.600,00 atau 3,51 %. Subyek Pajak adalah Pemilik Sarang Burung yang tempat pemeliharaan Sarang burungnya berada di dalam daerah, setiap mengambil atau mengunduh sarang burungnya dikenakan Pajak Pengambilan Sarang Burung. Perkembangan Pajak Sarang

burung masih ditemukan hambatan meskipun mengalami kenaikan target. Hambatan lebih disebabkan masih kurang sadarnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perda yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu dalam meningkatkan target akan diupayakan melalui sosialisasi dan juga tindakan yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang selama ini mangkir ketika ada penagihan oleh petugas di lapangan.

Retribusi Daerah

Secara keseluruhan penerimaan Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 20.914.180.200,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.505.929.530,00 atau sebesar 13,61 %. Dari masing-masing komponen Retribusi, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan diproyeksikan sebesar Rp. 8.625.681.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 968.368.280,00 atau sebesar 12,65 %. Penerimaan retribusi ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, maka kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesehatan terus ditingkatkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau. Untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSD Dr. Soegiri ditargetkan sebesar Rp. 7.267.331.000,00 dan Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp. 1.358.350.000,00.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diproyeksikan sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. Retribusi ini merupakan pembayaran

atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mencapai target tersebut akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan dan penataan keadministrasian data yang lebih akurat.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan diproyeksikan sebesar Rp. 1.868.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 756.000.000,00 atau sebesar 67,99 %. Untuk Bea Cetak KTP ditargetkan sebesar Rp. 1.588.000.000,00 dan Bea Cetak Akta Catatan Sipil ditargetkan sebesar Rp. 280.000.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diproyeksikan sebesar Rp. 3.698.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 468.954.250 atau sebesar 14,52 %. Khusus terhadap parkir berlangganan kenaikan ini disesuaikan dengan potensi jumlah kendaraan roda dua maupun roda 4 yang diharapkan telah teradministrasikan di Tahun 2008, sedangkan untuk parkir harian ditepi jalan umum merupakan potensi dari pemungutan kendaraan diluar wilayah administrasi Kabupaten Lamongan.

Retribusi Pelayanan Pasar diproyeksikan sebesar Rp. 1.965.300.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 70.300.000,00 atau sebesar 3,71 %. Kenaikan ini akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan mengingat bahwa potensi untuk mengembangkan dan meningkatkan wajib retribusi ini semakin berkembang. Oleh karena itu perlu adanya

penyempurnaan sistem tagihan pedagang dengan mengedepankan fungsi pelayanan untuk menciptakan pasar yang memadai, bersih, tertib dan aman sehingga memberi manfaat kepada pedagang, masyarakat umum dan memberikan kontribusi riil kepada Pemerintah Kabupaten.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diproyeksikan sebesar Rp. 425.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 3,66 %. Kenaikan ini merupakan proyeksi dari potensi keseluruhan dari kendaraan bermotor untuk angkutan yang ada di Kabupaten Lamongan yang diharapkan mengalami peningkatan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diproyeksikan sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 100,00 %. Kenaikan ini diupayakan melalui intensifikasi pemungutan terhadap perkantoran Pemerintah dan swasta dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Lamongan

Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya pada lokasi pelayanan publik (toilet, rest area dan tanah-tanah dan bangunan yang disewakan). Untuk tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp. 1.089.088.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.788.000,00 atau sebesar 8,55 %. Kenaikan ditargetkan dari sewa tanah untuk papan reklame dan pemanfaatan gedung untuk dipakai oleh Bank Daerah Lamongan.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan dimana untuk Kabupaten Lamongan memiliki Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di 5 lokasi TPI disepanjang pantai di Kabupaten Lamongan. Untuk penerimaannya diproyeksikan sebesar Rp. 360.500.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2007.

Retribusi Jasa Usaha Terminal di Lamongan hanya memiliki 2 obyek yakni di Terminal Kota Lamongan dan Terminal Babat. Masih adanya keterbatasan fungsi terminal di Lamongan mengakibatkan penerimaan ini ditargetkan tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 118.728.000,00.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Usaha Khusus Parkir diproyeksikan sebesar Rp. 122.658.200,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.894.200,00 atau sebesar 5,05 %, meskipun salah satu obyeknya dihapus yakni Kargo Terminal Babat yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Pasar Agrobis. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan penerimaan ini akan diupayakan intensifikasi pada seluruh obyek tempat parkir khusus.

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan diproyeksikan sebesar Rp. 49.800.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.500.000,00 atau sebesar 9,93 %. Adanya kenaikan konsumsi daging serta perkembangan jumlah ternak di Lamongan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor jasa usaha potong hewan.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga diproyeksikan sebesar Rp. 388.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.000.000,00 atau naik

sebesar 2,92 %. Obyek penerimaan Retribusi ini meliputi pengelolaan makam Sunan Drajad, waduk Gondang dan kereta kelinci. Dari obyek tersebut diharapkan akan berkembang seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diproyeksikan sebesar Rp. 750.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 65.000.000,00 atau sebesar 8,18 %. Penurunan tersebut merupakan implikasi besarnya target Tahun 2007 yang mengalami peningkatan pembangunan sektor perumahan. Proyeksi perkembangan di Tahun 2008 diperkirakan mengalami penurunan sehingga target ini perlu dilakukan penyesuaian.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian diproyeksikan sebesar Rp. 133.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau sebesar 8,13 %. Kenaikan ini disesuaikan dengan data potensi perusahaan yang telah mengadmisnistrasikan di tahun 2007.

Retribusi Izin Trayek diproyeksikan sebesar Rp. 17.100.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. Tidak adanya perubahan target tersebut karena sedikitnya tambahan armada baru.

Retribusi Ijin Usaha Perikanan diproyeksikan sebesar Rp. 10.000.000,00. Tidak dinaikkannya target ini disesuaikan dengan pencapaian pendaftaran perusahaan yang telah terdata.

Untuk Retribusi Izin Jasa Usaha yang dikelola khususnya oleh Kantor Perijinan dapat diuraikan sebagai berikut :

Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi ditargetkan sebesar ditargetkan sebesar Rp. 21.875.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.375.000,00 atau sebesar 157,35 %.

Retribusi Izin Jasa Usaha Perdagangan ditargetkan sebesar Rp. 52.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.500.000,00 atau sebesar 9,38 %.

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ditargetkan sebesar Rp. 46.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.500.000,00 atau sebesar 3,33 %.

Retribusi Tanda Daftar Industri ditargetkan sebesar Rp. 8.900.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.900.000,00 atau sebesar 78,00 %.

Retribusi Tanda Daftar Gudang ditargetkan sebesar Rp. 1.050.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 950.000,00 atau sebesar 47,50 %.

Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi pemeriksaan Kesehatan Hewan diproyeksikan sebesar Rp. 44.000.000,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.000.000,00 atau sebesar 10,00 %.

Retribusi Izin Penebangan Kayu dan tata usaha kayu rakyat diproyeksikan sebesar Rp. 55.000.000,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.000.000,00 atau sebesar 17,02 %.

Retribusi Ijin Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras diproyeksikan sebesar Rp. 15.000.000,00, sehingga tidak mengalami kenaikan.

Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal diproyeksikan sebesar Rp. 7.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.000,00 atau sebesar 7,69 %.

Retribusi Biaya pengandaan dokumen pengadaan barang dan jasa merupakan obyek penerimaan dari aktivitas pelelangan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Dari penerimaan ini diproyeksikan sebesar Rp. 825.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 125.000.000,00 atau sebesar 17,86 %. Dengan kenaikan volume kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dituangkan didalam APBD maka ditargetkan penerimaan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Retribusi Izin Eksplorasi, pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) diproyeksikan sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 300.000,00 atau sebesar 11,11 %.

Retribusi Izin Usaha Bidang Pariwisata diproyeksikan sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. Perkembangan retribusi ini masih memerlukan sosialisasi dan pendataan sehingga untuk dikaji potensi yang ada dalam meningkatkan penerimaan ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan 3 tahun terakhir dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, meski ada beberapa obyek penerimaan yang mengalami stagnasi kinerjanya. Kinerja yang baik ditunjukkan dari penyertaan modal Pemerintah kepada lembaga keuangan seperti Bank Daerah Lamongan dan Bank Pembangunan Jatim, sedangkan Kontribusi Wisata Bahari Lamongan menunjukkan adanya perkembangan yang paling pesat dalam menyumbangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Secara keseluruhan dari jenis penerimaan ini ditargetkan mencapai sebesar Rp. 10.560.635.626,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.012.890.181,00 atau sebesar 10,61 %. Untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen penerimaannya, yakni :

Bank Daerah Lamongan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 443.874.126,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.890.181,00 atau sebesar 2,99 %.

Dari PD Aneka usaha Lamongan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 155.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Penerimaan dari PT. Tirta Maharani ditargetkan sebesar Rp. 432.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Bank Pembangunan Jawa Timur ditargetkan mencapai sebesar Rp. 1.529.761.500,00 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Penyertaan Modal kepada PT. Wisata Bahari Lamongan ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan ini ditargetkan mencapai sebesar Rp. 8.926.592.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar 20,95 %. Untuk mengetahui penurunan penerimaan ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni :

Dari Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 210.250.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 91.750.000,00 atau sebesar 77,43 %. Adanya rencana kenaikan aktivitas pembangunan kantor di Tahun 2008 maka target dari penerimaan ini akan dinaikkan khususnya untuk penerimaan yang berasal dari penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Sedangkan dengan menurunkan Suku Bunga SBI 3 Bulan suku bunga mengalami penurunan selama Tahun 2007. Di Tahun 2008 diperkirakan mengalami hal yang sama dengan tingkat suku yang cukup stabil dibawah level 10 %.

Penerimaan Jasa Giro diproyeksikan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Untuk Penerimaan Bunga Deposito diproyeksikan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan pengembalian restitusi dari pajak tersebut

akibat dari kebijakan penurunan tarif pajak tersebut. Di Tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 atau sebesar -64,29 %, Penurunan ini merupakan penyesuaian dari target yang dikembalikan secara bertahap melalui kompensasi.

Penerimaan Usaha Dinas diproyeksikan sebesar Rp. 1.757.342.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 123.342.500,00 atau sebesar 6,56 %. Penurunan ini disesuaikan dengan besaran kegiatan revolving yang dilaksanakan oleh SKPD.

Penerimaan Lain-Lain diproyeksikan sebesar Rp. 409.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 534.000.000,00 atau sebesar 56,63 %.

DANA PERIMBANGAN

Alokasi Dana Perimbangan Kabupaten Lamongan Lamongan Tahun Anggaran 2008 targetnya didasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 10 Oktober 2007 tentang alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun 2008.

Penerimaan Dana Perimbangan dialokasikan sebesar Rp. 730.104.068.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 77.834.750.085,00 atau sebesar 11,93 %. Secara rinci terhadap kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperkirakan mencapai sebesar Rp. 44.209.340.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 86.573.000,00 atau sebesar -0,20 %.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dialokasikan sebesar Rp. 3.051.490.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.209.838.522,00 atau sebesar 65,69 %.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21) dialokasikan sebesar Rp. 3.709.600.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.723.456.157 atau sebesar 86,77 %.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :

Provisi Sumber Daya Hutan dialokasikan sebesar Rp. 459.150.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 292.761.360,00 atau naik sebesar 175,95 %.

Iuran Eksplorasi dialokasikan sebesar Rp. 3.230.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 322.500,00 atau sebesar 11,09 %.

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan dialokasikan tetap sebesar Rp. 350.110.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 104.435.454,00 atau sebesar Rp. 22,98 %.

Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dialokasikan tetap sebesar Rp. 3.056.768.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum dialokasikan sebesar Rp. 599.292.380.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.689.380.000 atau sebesar 10,86 %.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sebesar Rp. 75.972.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.110.000.000,00 atau sebesar 26,91 %.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Penerimaan ini secara keseluruhan berasal dari Bagi Hasil Propinsi yang terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 8.715.018.150,00 yang berarti tidak mengalami kenaikan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 8.351.148.414,00 yang berarti tidak mengalami kenaikan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 14.970.476.779,00 yang berarti tidak mengalami kenaikan.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dialokasikan sebesar Rp. 98.048.198,50 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dialokasikan sebesar Rp. 442.966.353,50 sehingga tidak mengalami kenaikan.

Sumbangan Pihak Ketiga dialokasikan sebesar Rp. 41.027.000,00.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

2.1 Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah secara bertahap akan menerapkan sistem anggaran terpadu, berbasis kinerja dan berdimensi jangka menengah sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejalan dengan upaya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, telah dilakukan pula upaya reformasi di bidang keuangan daerah dengan penyempurnaan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. sebagai penjabaran atas ketentuan dimaksud, Tahun 2006 telah terbit Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Ketentuan-ketentuan dimaksud merupakan upaya reformasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan: penerapan prinsip *unified budget*; perubahan *T-account* menjadi *I-account*; perubahan anggaran berimbang menjadi anggaran defisit/surplus; perubahan *incremental budgetary* menjadi *performance based-budget*; adanya klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja; perubahan

dari *single entry* menjadi *double entry*; penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Internasional; serta anggaran berdasarkan *medium term expenditure framework* (MTEF).

2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sebagaimana ditentukan dalam Prioritas dan Plafond Anggaran, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merumuskan program prioritas di Tahun 2008 yang perlu segera ditangani, yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan, perbaikan iklim tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia
2. Peningkatan kesempatan kerja dan kemudahan investasi
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan
4. Pembangunan infrastruktur sebagai pendorong akselerasi investasi
5. Optimalisasi dan revitalisasi perikanan dan kelautan

2.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah didalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 direncanakan dialokasikan sebesar Rp. 827.491.249.441,00. Secara keseluruhan nilai Belanja Daerah apabila dibandingkan dengan Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4,38 %. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten

dengan prioritas pembangunan. Belanja Pegawai sesuai dengan pernyataan Presiden didalam penyampaian Keterangan Nota Rancangan APBN Tahun 2007 pada tanggal 16 Agustus 2007, telah memberikan sinyal untuk menaikkan Belanja Gaji pokok PNS, begitu juga untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pembangunan masyarakat telah ditingkatkan alokasinya khususnya bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur pedesaan dan sarana pelayanan publik.

Dilihat dari stuktur Belanja Daerah, terhadap rencana belanja daerah yang telah dialokasikan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung yang memiliki peran dalam menunjang seluruh kebutuhan belanja pegawai PNS dan Pegawai Tidak Tetap, serta kebijakan Bantuan Sosial, Hibah dan Bagi Hasil serta Belanja Tidak Terduga, dialokasikan mencapai sebesar Rp. 470.991.340.541,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,90 %. Kecilnya kenaikan Belanja Tidak Langsung tersebut karena Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membatasi alokasi belanja yang bersifat bantuan dan hibah, sedangkan untuk belanja pegawai yang diperuntukkan untuk Belanja PNS dan Tenaga Kontrak secara kumulatif mengalami kenaikan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pokok PNS.
2. Belanja Langsung yang merupakan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah direncanakan dialokasikan mencapai sebesar Rp. 356.499.908.900,00 atau naik sebesar 7,85 %.

Untuk memperjelas rencana pencapaian Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008, perkenankanlah saya menyampaikan uraian belanja daerah sesuai dengan struktur organisasi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 321.027.824.000,00 atau naik 9,49 %. Berbagai kebijakan pendidikan di Kabupaten Lamongan diarahkan untuk perbaikan kualitas infrastuktur pendidikan dengan sasaran bahwa di tahun 2009 tidak ada lagi bangunan sekolah di Kabupaten Lamongan yang tidak layak untuk penyelenggaraan pendidikan dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Tingkat Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum dan setingkatnya. Disamping untuk pembangunan dan pemeliharaan fisik sekolah, bidang pendidikan juga menjangkau untuk membantu sarana dan prasarana pendidikan seperti alat peraga, alat laboratorium dan buku perpustakaan.

Guna mendukung pendidikan untuk semua, Pemerintah Kabupaten Lamongan masih memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dengan program beasiswa untuk memperoleh pendidikan pada perguruan tinggi. Target yang diharapkan program ini adalah memberikan beasiswa kepada 250 mahasiswa.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 52.869.314.500,00 *rupiah* atau naik 7,03 %.

Disamping masih meneruskan program pemerintah kabupaten Lamongan dalam menyelenggarakan rawat Jalan Gratis, Program dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat untuk Tahun 2008 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan melalui peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, program ini akan secara berkesinambungan dilakukan sehingga akan menjangkau diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan disamping adanya puskesmas-puskesmas pembantu dan pembangunan Poliklinik Desa. Tahun 2008 ini juga Pemerintah secara progresif berencana akan membangun Rumah Sakit Ngimbang Tipe C guna memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat di bagian selatan.

Yang tak kalah pentingnya adalah juga harus dilakukan secara rutin untuk penanggulangan penyakit menular, karena dirasakan masih tingginya endemi penyakit menular di Lamongan khususnya Demam Berdarah, dan juga perhatian untuk pengawasan pencegahan flu burung di wilayah Kabupaten Lamongan.

3. RSD Dr. Soegiri

RSD Dr. Soegiri direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 20.070.851.500,00 atau turun 11,37 %.

Rencana alokasi belanja untuk RSD Dr. Soegiri masih diprioritaskan untuk kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, disamping sambil menunggu pembangunan

Rencana alokasi belanja untuk RSD Dr. Soegiri disediakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, juga akan dilakukan penambahan pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik.

4. Dinas PU Bina Marga

Guna mendukung upaya terwujudnya tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai di Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga dalam tahun 2008 direncanakan memperoleh alokasi sebesar Rp. 43.104.719.000,00 atau turun sebesar 3,83 %.

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan jalan dan jembatan diantaranya, pembangunan jembatan akan dilakukan pada 8 titik jembatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.416.000.000,00, pembangunan saluran drainase jalan sepanjang 5,75 Km di 4 ruas jalan dengan menelan dana sebesar 318 juta rupiah. Untuk pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan Kabupaten tetap akan menjadi perhatian oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan serta guna memperluas akses jalan kepada masyarakat pedesaan, telah dilakukan peningkatan jalan poros desa.

5. Dinas PU Pengairan

PU Pengairan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.691.382.000,00 atau turun sebesar 20,70 %. Fungsi alokasi anggaran pada Dinas PU Pengairan dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan air baku bagi pertanian dan tambak di wilayah Kabupaten Lamongan.

Guna mengurangi bencana banjir, maka normalisasi sungai dan waduk masih dilakukan pada beberapa wilayah yang rawan akan banjir.

Sedangkan untuk menyediakan air bersih di wilayah pedesaan telah diprogramkan pembangunan jaringan air bersih dengan 30 sasaran dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.573.052.000,00.

6. Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Cipta Karya direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 49.919.867.000,00 atau naik 47,81 %. Di Tahun 2008 sejumlah proyek infrakstruktur yang berskala besar telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Beberapa diantaranya adalah pembangunan lanjutan Kantor PD BPR Bank Daerah Lamongan yang dialokasikan sebesar Rp. 2.900.000.000,00, Pembangunan Gedung Islamic Center dan Perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

Untuk menghadirkan ketersediaan infrastruktur perkotaan di Kota Lamongan agar lebih menunjukkan eksistensi sebagai kota perdagangan, rekreasi dan pusat pemerintahan, dalam Tahun 2008 juga akan direncanakan pembangunan Lamongan Plasa dengan alokasi dana untuk tahun 2008 disediakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00.

7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

BAPPEDA direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.493.584.000,00 atau naik 3,53 %.

Alokasi tersebut disamping untuk menyediakan operasional agenda perencanaan tahunan seperti penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), juga disediakan untuk pendampingan sejumlah program pemerintah pusat untuk

pemberdayaan pembangunan masyarakat miskin, pemukiman dan lingkungan hidup.

8. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.609.293.000,00 atau naik 5,76 %. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk pembangunan Terminal Paciran dengan alokasi dana sebesar 2 milyar rupiah. Untuk meningkatkan kualitas prasarana infrastruktur jalan telah disediakan beberapa lampu lalu lintas traffic light dengan sistem counter down, sehingga mampu mengurangi *lossing time* para pengendara kendaraan bermotor.

9. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.043.538.000,00 atau naik 5,75 %. Alokasi anggaran untuk Kantor Capil dan Kependudukan diantaranya disediakan untuk operasional Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang difungsikan untuk pelayanan KTP dan Akta catatan Sipil.

10. Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial

Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 13.956.106.000,00 atau naik 30,42 %.

Program Pembinaan keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan akan dilakukan peningkatan dengan

menyediakan sarana mobilitas bagi para penyuluh KB, disamping juga akan dilakukan pengadaan alat kontrasepsi KB guna menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan.

11. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.534.223.600,00 atau naik 24,26 %.

Guna mengurangi tingkat pengangguran, peran Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang meliputi ruang lingkup keterampilan elektronika, service kendaraan bermotor, menjahit pertukangan dan ketrampilan las.

Sedangkan untuk pencari kerja akan disediakan informasi bursa kerja melalui *Job Market Fair* guna memberikan akses yang luas bagi pencari kerja sehingga diharapkan mampu membantu dalam mencari lapangan pekerjaan.

12. Kantor Perdagangan dan Koperasi

Kantor Perdagangan dan Koperasi direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.629.233.000,00 atau naik sebesar 52,34 %.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan semakin ditumbuhkan. Untuk memfasilitasi agar produk-produk unggulan Lamongan semakin dikenal, dalam Tahun 2008 akan dilakukan perbaikan pada *showroom* produk unggulan dengan menelan dana sebesar Rp. 1.764.000.000,00.

Sedangkan program pembangunan Pasar Agrobis Babat semakin dimantapkan dengan menyediakan dana pendamping oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

13. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.347.016.500,00 atau naik 1,83 %.

Semakin meningkatnya bencana alam yang terjadi diberbagai daerah, memberikan kewaspadaan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kewaspadaan bencana alam, untuk itu telah diprioritaskan untuk pembekalan dan pelatihan teknis dalam rangka penanggulangan bencana alam.

14. Kantor Polisi Pamong Praja

Kantor Polisi Pamong Praja direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.891.744.500,00 atau turun 5,38 %

Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penegak Peraturan Daerah. Program di tahun 2008 disediakan untuk operasional Yustisi dan penegakan Peraturan Perda guna tertib lingkungan diwilayah Kabupaten Lamongan.

15. DPRD

DPRD direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.596.792.448,00 atau turun 37 %.

Penurunan alokasi pada belanja DPRD menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006

16. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 564.475.610,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. Pengalokasian belanja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

17. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 43.993.83.000,00 atau turun 18,41 %. Sejumlah program pembangunan disediakan dalam Pos Sekretariat Daerah. Untuk mengkoordinasikan dalam rangka Bangun Praja guna meningkatkan keindahan Kota Lamongan telah dilakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang kota dan lingkungan.

Disamping itu juga guna pemantauan lingkungan masyarakat agar semakin bersih dan sehat, maka disediakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar.

Dibidang pemerintahan, guna meningkatkan sumber daya aparat desa telah disediakan orientasi kepada Kepala Desa dan pembinaan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) serta secara berhadap dialokasikan untuk pembangunan pendopo - pendopo Pemerintah Desa.

Sedangkan untuk mendukung program pembangunan, telah disediakan alokasi untuk pengadaan tanah dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00.

18. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 9.882.378.000,00 atau naik 20,43 %. Alokasi anggaran Sekretariat DPRD disediakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD, baik melalui kegiatan workshop, kegiatan reses, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan.

19. Badan Keuangan dan Barang Daerah

BKBD direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 96.263.821.000,00 atau turun 24,55 %.

Besaran alokasi pada BKBD disamping alokasi anggaran sebagai SKPD juga berfungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sebagai SKPD, alokasi anggaran untuk BKBD dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan di bidang keuangan. Disamping kegiatannya disesuaikan dengan siklus keuangan daerah yakni dalam rangka untuk penyusunan PPAS, APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD, juga guna meneruskan program pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan telah menggunakan pelayanan keuangan yang telah menyatukan dengan seluruh SKPD, sehingga dapat dilakukan secara online untuk penatausahaan keuangan dan akuntansi. SKPD yang telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) secara langsung dapat diakses oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D guna proses pencairan anggarannya, sehingga dapat mempercepat pelayanan keuangan daerah.

BKBD berfungsi sebagai SKPKD, telah dialokasikan sejumlah subsidi sebesar Rp. 3.205.800.000,00, belanja hibah yang dialokasikan sebesar Rp. 10.922.800.000,00, sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 14.255.325.000,00 dan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.920.969.000,00 serta Bantuan Keuangan sebesar Rp. 49.435.678.000,00 dan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

20. Badan Pengawas Daerah

Badan Pengawas Daerah direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.197.883.000,00 atau naik 5,15 %.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien, dan efektif, peran pengawasan daerah semakin penting untuk dilakukan. Alokasi tahun 2008 disediakan untuk operasional pengawasan internal secara berkala diseluruh SKPD di Kabupaten Lamongan.

21. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan Kelurahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 31 462 724.000,00 atau naik 25,01 %.

Disamping memberikan ketersediaan kebutuhan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, alokasi anggaran di tahun 2008 juga akan mengakomodir gaji Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS.

22. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.409.784.983,00 atau turun 1,39 %.

Program Dinas Pendapatan Daerah diantaranya dipergunakan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

23. Kantor Perijinan

Kantor Perijinan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.289.916.500,00 atau naik 117,34 %. Alokasi ini dalam tahun anggaran 2008 diantaranya akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Perijinan, disamping juga untuk peningkatan transparansi pelayanan perijinan melalui penyuluhan perijinan kepada Kepala Desa, pembuatan leaflet dan baliho.

24. Badan Kepegawaian

Badan Kepegawaian direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 8.655.613.000,00 atau naik 5,36 %. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah akan semakin ditingkatkan. Pelatihan serta pembekalan teknis lebih dititikberatkan kepada profesionalisme dalam mengembang tugas serta peningkatan sumber daya aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta aparatur dalam pembangunan daerah.

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.187.412.000,00 atau naik 20,32 %.

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu dalam alokasi tahun 2008 telah dialokasikan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

masyarakat pelaksanaan program Pengembangan Kecamatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

26. Arsip dan Kepustakaan

Kantor Arsip dan Kepustakaan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.196.471.300,00 atau naik 40,28 %.

Alokasi anggarannya disediakan untuk pengelolaan arsip in-aktif agar tertata secara terstruktur. Untuk Perpustakaan secara berkala akan disediakan pengadaan Buku Perpustakaan dengan alokasi dana mencapai sebesar Rp. 300.000.0000,00. Disamping itu dianggarkan pula untuk merehab gedung UPT Perpustakaan.

27. Kantor Informasi dan Komunikasi

Kantor Informasi dan Komunikasi direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.515.467.000,00 atau turun 4,54 %.

Alokasi anggarannya diantaranya dipergunakan untuk menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Lamongan serta event-event penting pemerintahan.

28. Kantor Pengelolaan Data Elektronik

KPDE direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.702.815.000,00 atau naik 13,03 %.

Alokasi anggarannya disediakan untuk operasional pemeliharaan jaringan komputer. Perlu disampaikan bahwa sampai sekarang ini setiap SKPD telah memiliki jaringan informasi secara terpadu sehingga memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan oleh SKPD untuk mempermudah dalam

memperoleh akses informasi dan sedang diadakan penambahan bandwidth untuk fasilitas internet.

29. Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas pertanian dan Kehutanan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.630.908.000,00 atau naik *11,88 %*.

Dengan perekonomian Lamongan yang masih didominasi sektor pertanian, pembangunan pertanian lebih tingkatan untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih mengedepankan peningkat, pendapatan petani. Untuk itu telah disalurkan pengadaan sarana dan prasarana pertanian dengan menyediakan seperti pengadaan pompa air, handtractor, mesin packing dan mesin pembuat emping jagung, serta pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.

30. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 12.316.355.000,00 atau turun *9,17 %*.

Alokasi anggaran diprogramkan diantaranya untuk pembangunan lost/gedung ikan outlet dimana Lamongan memiliki potensi kelautan yang sangat besar untuk dibudidayakan, disamping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Disamping itu juga telah dialokasikan untuk pencegahan abrasi air laut telah dibangun break water di Desa Sidokumpul dan Kemantren.

31. Dinas Pengelolaan Pasar

Dinas Pengelolaan Pasar direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.959.166.000,00 atau turun *34,15 %*.

Untuk menyediakan prasarana perdagangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyediakan alokasi untuk perbaikan beberapa prasarana Pasar yang meliputi rehabilitasi los pasar Hewan Babat dan Tikung serta pembuatan parkir, dan perbaikan drainase Pasar.

32. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.3.188.251.000,00. Penyebarluasan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lamongan menjadi tugas penting lembaga baru ini. Untuk itu dalam tahun 2008, telah disediakan alokasi anggaran untuk penyebarluasan informasi kebudayaan dan tempat-tempat wisata dengan mengikuti festival-festival budaya di lingkup regional maupun nasional.

33. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas pemuda dan Olahraga direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 21.289.236.000,00. Alokasi anggarannya diprioritaskan diantaranya untuk penyelenggaraan pembinaan olah raga prestasi. Dibidang kepemudaan telah dilakukan beberapa agenda olahraga dan karya ilmiah remaja (KIR) untuk memberikan kesempatan para pemuda di Kabupaten untuk menunjukkan prestasinya di kancah daerah maupun nasional.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah, sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari ke-2 komponen tersebut.

Struktur APBD dengan menggunakan sistem anggaran kinerja menyebabkan anggaran pada periode tertentu harus mengalami surplus atau defisit. Dengan kondisi suatu anggaran yang surplus atau defisit tersebut maka Pembiayaan sangat mutlak diperlukan dengan melalui kebijakan keuangan.

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen yakni (i) Penerimaan Daerah dan, (ii) Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (ii) Transfer dari Dana Cadangan (iii) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan (iv) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan.

Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Transfer ke Dana Cadangan (ii) Penyertaan Modal (iii) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo (iv) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

2.2 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,53 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah lebih besar dari perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran rata-rata sekitar 10,43 persen.
2. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
3. Defisit yang terjadi tidak boleh melampaui sebesar 3 % dari *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Surplus/Defisit akan dilakukan kebijakan yang lebih memfokuskan pada pembiayaan intern guna

menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.

5. Perlu dilakukan pemberdayaan pembiayaan daerah dalam rangka menjaga kesinambungan anggaran dimasa mendatang melalui Penyertaan Modal
6. Melaksanakan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan.

2.4 Estimasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi dalam APBD Tahun Anggaran 2008, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 816.150.436.221,00, sedangkan Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 827.491.249.441,00 sehingga defisit anggaran yang terjadi sebesar Rp. 11.340.813.220,00, maka beberapa kebijakan pembiayaan daerah dapat diuraikan dibawah ini :

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selama 3 tahun terakhir, penerimaan pembiayaan mengalami perkembangan volume yang berfluktuatif karena sumber penerimaannya merupakan entitas dari aktifitas belanja maupun investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 49.711.309.600,00, yang terdiri dari berbagai sumber, yakni sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

Merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana dari aktifitas belanja, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dialokasikan sebesar Rp. 29.000.000.000,00

2. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, dimana untuk di Kabupaten Lamongan seluruhnya berasal dari aktifitas investasi non permanen yakni kegiatan revolving yang diselenggarakan oleh SKPD. Untuk Penerimaan Piutang Daerah ditargetkan sebesar Rp. 20.711.309.600,00. Adapun sumber penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Kehutanan ditargetkan sebesar Rp. 12.075.000.000,00
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan ditargetkan sebesar Rp. 4.350.000.000,00
- c. Dinas Perdagangan dan Koperasi ditargetkan sebesar Rp. 3.232.800.000,00
- d. Kantor Pengelolaan Pasar ditargetkan sebesar Rp. 1.053.509.600,00

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 38.301.583.200,00. Adapun kebijakan pengeluaran dalam pembiayaan tersebut dipergunakan untuk :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana Cadangan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, untuk pembentukan Dana Cadangan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 dialokasikan sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Ruang lingkup penyertaan modal dapat berupa penganggaran sejumlah dana yang akan di investasikan / disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan BUMD maupun BUMN dan investasi dapat berupa dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

Penyertaan modal kepada BUMD di Tahun 2008 dilakukan kepada PDAM yang dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan Bank Daerah Lamongan sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

Penyertaan modal kepada kelompok masyarakat dan usaha kecil dan menengah dialokasikan sebesar Rp. 24.260.000.000,00 yang diselenggarakan oleh SKPD yakni :

- a. Dinas Pertanian dan Kehutanan dialokasikan sebesar Rp. 14.650.000.000,00
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan dialokasikan sebesar Rp. 4.700.000.000,00
- c. Dinas Perdagangan dan Koperasi dialokasikan sebesar Rp. 4.360.000.000,00
- d. Kantor Pengelolaan Pasar dialokasikan sebesar Rp. 550.000.000,00

3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2008 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pembayaran pokok utang sesuai dengan data rekonsiliasi dengan Departemen Keuangan, untuk Tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp. 41.583.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok pinjaman RDA sebesar Rp. 16.583.200,00
- b. Pembayaran angsuran pokok pinjaman SLA sebesar Rp. 25.000.000,00

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto didapat sebesar Rp. 11.409.726.400,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan sebesar Rp. 68.913.180,00.

BAB V

PENUTUP

Dengan melihat perkembangan serta dinamika aspirasi masyarakat yang kian berkembang, sangat jelas bahwa Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata yang ada dalam masyarakat dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008.

Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 secara garis besar adalah sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp.816.150.436.221,00 (ii) Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.827.491.249.441,00 (iii) Defisit Anggaran sebesar Rp.11.340.813.220,00

Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp.49.711.309.600,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.38.301.583.200,00, sehingga mengakibatkan Pembiayaan Netto sebesar Rp.11.409.726.400,00 yang mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan sebesar Rp.68.913.180,00